BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian dalam bentuk wawancara dan dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data temuan hasil penelitian akan dilakukan pembahasan sesuai dengan teori dan logika. Agar lebih terperinci dan terurai, maka dalam pembahasan ini akan disajikan dengan permasalahan yang diteliti.

A. Pengelolaan Sistem Keuangan Desa di Desa Joketro

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, mekanisme pengelolaan sistem keuangan desa di Desa Joketro pada awalnya dilakukan secara manual. Yaitu segala pencatatan dari hasil perincian kegiatan dicatat sendiri oleh bagian sekretaris desa dan kaur keuangan atau bendahara desa. Kemudian pada tahun 2017, pemerintah membuat sebuah sistem aplikasi untuk keuangan di desa, yaitu sistem aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini dibuat pada tahun 2017 dan baru digunakan pertama kali pada tahun 2019. Dengan adanya sistem ini, maka mempermudah dalam penginputan data keuangan di desa.

Desa Joketro merupakan salah satu desa pertama di Kecamatan Parang yang sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan atau biasa disebut dengan Siskeudes. Aplikasi ini mempermudah jalannya dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan aplikasi ini untuk pencatatan atas penggunaan dana yang keluar atau masuk, tinggal diinput dalam sistem aplikasi. Pada aplikasi ini sudah ada perincian sub bidang, kemudain operator tinggal memasukkan data ke dalam aplikasi tersebut. Dalam aplikasi Siskeudes ini,

semua nominalnya harus nol (0), jika tidak, maka aplikasi ini tidak bisa membacanya atau dapat dikatakan tidak *balance*. Ini merupakan sebuah sistem seperti pencatatan akuntansi.

Hal positif dengan adanya sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa, dalam pengelolaan keuangan di Desa Joketro dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam pencatatan keuangan. Tetapi yang namanya sistem pasti ada kelemahannya. Dalam penggunaan aplikasi ini pada saat penginputan data harus dilakukan secara benar, apabila terjadi kesalahan angka yang diinput, maka akan berakibat fatal terhadap pelaporan keuangan. Dengan hal ini dalam penginputan data keuangan diharapkan dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Pada permasalahan ini diharapkan pemerintah dapat memberikan pembaharuan sistem aplikasi agar dapat mempermudah dalam penggunaan sistem aplikasi keuangan di desa.

Pada pengelolaan keuangan desa, Desa Joketro menerapkan asas transparansi, akuntabel atau akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Hal ini sesuai dengan teori yaitu sebagai berikut :

1. Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan desa. Informasi yang didapatkan harus bersifat akurat tanpa adanya diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel (accountability) adalah wujud pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pengendalian keuangan sesuai dengan kebijakan yang telah dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam asas ini setiap hal yang telah dilakukan atau hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. Partisipatif adalah di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, semua lembaga desa serta masyarakat desa harus ikut serta dalam pembangunan desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran adalah sistem pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam pemerintahan desa.⁸⁴

Dalam pengelolaan keuangan, Desa Jeketro berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Presiden (Pepres), Peraturan Pemerintah (PP), Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri), Permendes (Peraturan Menteri Perdesaan). Dari peraturan-peraturan tersebut diturunkan lagi menjadi Peraturan Buapti (Perbup) dan Peraturan Desa (Perdes).

Saat ini Desa Jeketro dalam pengelolaan keuangannya berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa. Dimana pada peraturan tersebut sudah dijelaskan semua tentang pengelolaan keuangan desa, termasuk pengelolaan dana desa. Tahapan yang ada dalam pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dan pada Permendagri tersebut juga sudah ada bidang

⁸⁴ Muksin Hi Abdullah “,Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Kepala Desa”, Jurnal Sistem Informasi:Volume 4 Nomor. 1 April 2019

dan sub bidang yang menjadi kategori akun-akun yang nantinya akan diinput dalam aplikasi Siskeudes.

Secara teori dalam hal pengelolaan keuangan desa, seperti pengelolaan Dana Desa harus melalui sebuah tahapan yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan di desa. Tahapan tersebut adalah tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan adalah merupakan serangkaian proses tahap awal yang sudah terstruktur atau terencana untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi dalam jangka waktu tertentu. “Biasanya di dalam perencanaan terdapat aktivitas mendefinisikan pada tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi.” Saat ini pengelolaan keuangan desa berprinsip pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban, dimana dalam pengelolaan dana desa tersebut harus ada realisasi dalam perencanaan awal dan juga laporan di akhir yang menyatakan hasil dari penggunaan dana yang telah didistribusikan dari pusat ke daerah.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah realisasi dari sebuah perencanaan dimana rencana-rencana yang telah dirancang di awal dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan, guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) dalam masing-

masing desa berdasarkan pada APBDes. Implementasi dari tindakan yang biasanya dilakukan oleh TPK serta LPMD.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib dalam melakukan pencatatan dari setiap pemasukan dan pengeluaran kas (arus keluar masuk dana) serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan dan akhir tahun secara tertib.

4. Pelaporan atau pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan proses akhir dari suatu perencanaan yang telah ditetapkan. Pada tahap pelaporan pihak desa membuat dua (2) laporan kepada BPD dan Bupati, sebagai bahan evaluasi dari perencanaan yang telah dilaksanakan. Ini merupakan implementasi dari pertanggungjawaban desa.⁸⁵

B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Di dalam pengelolaan Dana Desa, Desa Joketro telah menggunakan anggaran yang telah ditransfer ke desa tersebut dengan baik. Dana Desa digunakan untuk pembangunan desa, seperti pembangunan masjid, jalan desa, jembatan, dan untuk kegiatan lainnya yaitu dalam bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya.

Secara teori Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan

⁸⁵Andrian Puspawijaya dan Julia Dwi N.S, “*Pengelolaan Keuangan Desa Edisi Kedua*” (Pusdiklatwas BPKP: Bogor, 2016) hal 11

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁸⁶

Penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Joketro lebih diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES). Hal ini sesuai dengan teori yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat 1 dan 2 yaitu :

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁸⁷

Pada pengelolaan Dana Desa, Desa Joketro sudah menerapkan asas-asas yang telah diberlakukan yaitu akuntabilitas. Dimana hal ini dapat diketahui bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus dibuatkan sebuah laporan yang berisikan laporan semester pertama dan laporan-laporan lain. Laporan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota. Laporan pertanggungjawaban merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah instansi atau lembaga, karena hal ini dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai instansi

⁸⁶ Komang Adi Kurniawan Saputra, et. all., “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Kirana”, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol 3. No. 1 (2018) 306-321 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)

⁸⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat 1 dan 2 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

tersebut apakah sudah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Desa Joketro mengelompokkan penggunaan Dana Desa sesuai dengan bidang-bidangnya yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Hal ini sesuai teori yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bidang-bidang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Sub bidang penyelenggaraan belanja, penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa (max 30%).
- b. Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- c. Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- d. Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- e. Sub bidang pertanahan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Sub bidang pendidikan
- b. Sub bidang kesehatan
- c. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Sub bidang kawasan permukiman

3. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak
 - a. Sub bidang penanggulangan bencana
 - b. Sub bidang pertanian dan peternakan
 - c. Sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
 - d. Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
 - e. Dan sebagainya⁸⁸

Untuk tahap pencairan Dana Desa itu langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada rekening desa. Mekanisme pencairan Dana Desa di Desa Jeketro yaitu pertama, desa mengajukan proposal dari perencanaan kegiatan yang telah disetahunkan (RKPDES) kepada inspektorat/ Bupati. Kemudian pada pemerintahan daerah kabupaten/ kota akan diurus ke kantor KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk melakukan pencairan. Ini sesuai dengan teori yaitu tentang tahapan penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tahap I berupa :
 - a) Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.

⁸⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

b) Peraturan Bupati/Wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

2) Tahap II berupa :

a) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya

3) Tahap III berupa :

a) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II.

b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

c) Laporan tingkat konvergensi pencegahan stunting kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.⁸⁹

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Sri Lestari dengan hasil penelitian yaitu sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.⁹⁰ Pada proses pengelolaan keuangan ada beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari tahap pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan yang terakhir pertanggungjawaban.

Desa Joretro saat ini sudah menerapkan tahapan-tahapan dalam pengelolaan Dana Desa seperti yang telah disebutkan diatas. Pada tahap perencanaan Desa Joretro telah merancang RPJMDES (Rencana Pembangunan

⁸⁹ Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro <http://kppnmetro.org/wp-content/uploads/2015/09/sebaran-desa.jpg>, Diakses pada 04-10-2020 Pukul 12.27

⁹⁰ Sri Lestari, *Skripsi Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*, (Surakarta :IAIN Surakarta, 2017)

Jangka Menengah Desa) dalam kurun waktu 6 tahun. Kemudian dibuat lagi RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dalam jangka waktu 1 tahun. Hasil dari RKP yaitu berupa APBDES yang nantinya akan dilaksanakan dalam periode yang telah ditetapkan. Setelah tahap perencanaan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, dimana pada tahap pelaksanaan ini Desa Joketro melaksanakan atau merealisasikan dari rencana kegiatan yang telah disepakati.

Selanjutnya yaitu tahap penatausahaan, dimana pada tahap ini lebih menekankan pada penggunaan/ pemrosesan dengan Sistem Keuangan Desa. Tahap ini merupakan tahap untuk mencatat dari setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang dilakukan oleh Kaur Keuangan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.⁹¹

Dari tahap penatausahaan, dilanjutkan pada tahap pelaporan. tahap pelaporan merupakan tahap dimana kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa pada semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui perantara camat. Laporan yang harus diserahkan yaitu berupa :

1. Laporan pelaksanaan APB Desa
2. Laporan realisasi kegiatan.

Proses dalam tahap pelaporan ini adalah kepala desa dibantu perangkat desa menyusun kedua laporan dengan menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. Setelah itu laporan disampaikan kepada Bupati/

⁹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Walikota untuk diverifikasi. Kemudian Bupati/ Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, paling lambat Bulan Agustus tahun berjalan.

Kemudian tahap terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban, dimana pada tahap ini semua kegiatan yang telah direncanakan dari awal dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Berapa jumlah kegiatan dan berapa anggaran yang telah dikeluarkan dilaporkan pada tahap pertanggungjawaban ini. Dari tahap ini pusat dapat mengetahui kegunaan alokasi dana yang telah ditransfer kepada daerah atau desa. Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan realisasi APB desa yang disampaikan kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Dan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan Peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir tahun anggaran. Dan dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan oleh Bupati kepada menteri melalui Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Dari tahap ini, selain untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, desa juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui media informasi, seperti web desa, facebook, instagram dan media informasi lainnya.

Informasi –informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat yaitu antara lain :

- a. Laporan realisasi APB Desa
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Kegiatan yang belum selesai dan/tidak terlaksana
- d. Sisa anggaran
- e. Alamat pengaduan⁹²

C. Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Di Desa Joketro

Dalam dunia bisnis maupun politik saat ini akuntabilitas dan transparansi sangat diperhatikan. Administrasi yang baik akan mendorong dalam meningkatkan akuntabilitas suatu pemerintahan. Selain itu administrasi yang baik dapat mewujudkan penatausahaan yang baik pula. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khusus dilakukan oleh bendahara desa. Hal ini diharapkan dapat menerapkan prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan juga prinsip transparansi.

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar “*good governance*” atau tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju “*clean goverment*” (pemerintahan yang bersih). Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan suatu hal yang baru. Saat ini, hampir diseluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan menerapkan konsep akuntabilitas dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan.

⁹² Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun2018 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Di dalam suatu entitas perusahaan atau instansi pemerintah, akuntabilitas merupakan suatu persyaratan dalam struktur pemerintahan dalam penyampaian argumen yang berkaitan dengan informasi atau sumber serta pemakaian sumber daya umum atau publik yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

Secara teori prinsip akuntabilitas merupakan mekanisme yang harus dijalankan oleh pejabat publik untuk menjelaskan dan memastikan bahwa tindakannya telah sesuai etis, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas disini lebih menekankan atau mensyaratkan pada pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan mandat yang telah diberikan.⁹³

Sedangkan transparansi secara teori yaitu memberikan sebuah informasi keuangan yang dilakukan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat yang didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atau transparan serta menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.⁹⁴

Pada pemerintahan Desa Joketro sudah menerapkan prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan prinsip transparansi atau keterbukaan. Dimana implementasi prinsip akuntabilitas ini dapat diketahui pada saat dilakukannya penyusunan dan penetapan RKPDES pemerintahan Desa Joketro, yaitu pada

⁹³ Elmi Zulsrianti, 2019, *Akuntabilitas dan Trasparansi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari pada Kantor Wilayah Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017*, Skripsi tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan

⁹⁴ Alfian Hamid, Skripsi: “*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Allokasi dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance*”, (Makasar: UIN Alauddin,2016), hal 40

saat melaksanakan rapat yang dihadiri perangkat desa, BPD, serta perwakilan dari masyarakat desa. Dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dibuat sebuah laporan pertanggungjawaban yang merupakan semua perincian dari seluruh anggaran yang telah digunakan pada semester pertama dan semester akhir. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD. Setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada BPD kemudian dilaporkan kepada Bupati/ Walikota. Hal ini merupakan sebuah pencerminan dari implementasi prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang ada di Desa Joketro.

Selain itu Desa Joketro sudah menerapkan prinsip transparansi, hal ini dapat dilihat pada proses pengelolaan keuangan yaitu pada tahap perencanaan, penatausahaan, dan juga tahap pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, Desa Joketro juga terbuka dengan masyarakat pada saat musdes (musyawarah desa) dalam penyusunan dan penetapan RKPDES. Pada tahap ini masyarakat juga ikut serta atau berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Pada tahap penatausahaan, Desa Joketro sudah memakai sistem aplikasi secara online yang atau biasa disebut dengan Sistem Keuangan Desa. Untuk operator dari sistem ini dilakukan oleh pihak eksternal dari perangkat desa (bukan perangkat desa). Pada tahap pertanggungjawaban, desa Joketro juga sudah menerapkan prinsip transparansi yaitu pada saat akhir tahun anggaran Desa Joketro menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota untuk disampaikan lagi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD

selaku perwakilan dari desa. Selain itu desa juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat, misalnya dalam hal laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, sisa anggaran, dll.

Transparansi ini dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap tata pemerintahan khususnya pada pemerintahan desa. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban pada perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan secara efektif.⁹⁵ Dengan adanya prinsip transparansi atau keterbukaan ini pada pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan dapat terbuka kepada masyarakat karena proses kelengkapan APBDes, masyarakat terlibat di dalamnya dengan demikian masyarakat mengetahui jalannya proses setiap program yang dibuat oleh pemerintah desa.

Di dalam penerapan transparansi, ada indikator-indikator yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya penyediaan dan akses informasi yang jelas mengenai perencanaan, prosedur pelaksanaan, serta pertanggungjawaban
2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
3. Keterbukaan terhadap proses pengelolaan
4. Keterbukaan informasi mengenai dokumen pengelolaan Dana Desa⁹⁶

Transparansi dalam segi akuntansi yaitu merupakan prinsip keterbukaan terhadap informasi keuangan kepada masyarakat, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah

⁹⁵ Adianto Asdi Sangki, dkk, "*Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*", Jurnal Eksekutif Vol 1 No 1, 2017

⁹⁶ Kristianten, "*Transparansi Anggaran Pemerintah*", (Jakarta:Rineka Cipta, 2006) hal 73

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Hal ini sama halnya dengan transparansi di Kantor Desa Joketro, bahwa dalam pembuatan laporan mengenai keuangan harus dilakukan secara tepat waktu. Laporan-laporan yang dibuat antara lain seperti laporan perencanaan APBDES. Laporan ini dapat diakses oleh masyarakat karena masyarakat juga wajib mengetahui perencanaan dan anggaran yang akan dilakukan. Tetapi ada laporan lain, seperti SPJ yang tidak di publish.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu oleh Alfian Hamid Tahun 2016 dengan judul transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* (studi empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan di 3 (desa) telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan desa.⁹⁷

⁹⁷ Alfian Hamid, Skripsi: “*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance*”, (Makasar: UIN Alauddin,2016)